

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian dilakukan pada KPP Pratama Semarang Barat, yang merupakan instansi vertikal dari DJP dibawah perintah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPP Pratama Semarang Barat memiliki tugas dalam memberikan pelayanan, melakukan pengawasan, serta melaksanakan penegakan hukum di sektor perpajakan bagi para wajib pajak yang terdaftar di wilayah Semarang Barat.

Laporan internal dari KPP Pratama Semarang Barat berfungsi sebagai sumber data sekunder dalam proses analisis penelitian ini selama periode 2020 hingga 2024. Variabel penelitian meliputi insentif pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan pajak, dan penerimaan PPN. Sampel jenuh digunakan dalam penelitian, maka jumlah sampelnya yaitu 60 data (12 laporan bulanan x 5 tahun). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana insentif pajak, pemeriksaan pajak, serta kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPN.

4.2 Analisis Data

Analisis data memiliki tujuan yaitu guna mengolah data, memberikan interpretasi, serta membuat kesimpulan dari hasil pengolahan data yang telah dikumpulkan. Analisis data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 26.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Bertujuan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum pada variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut merupakan kesimpulan yang telah dianalisis dengan statistik deskriptif:

Tabel 4.1

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerimaan PPN	60	-0,48	1,38	0,0636	0,37602
Insentif Pajak	60	0,00	65,00	15,90	12,204
Pemeriksaan Pajak	60	0,00	26,00	2,95	6,596
Kepatuhan Pajak	60	7,97	9,53	8,7802	0,64105
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Output SPSS 26, data diolah tahun 2025

Output SPSS pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah data yang dianalisis untuk setiap variabel penelitian adalah sebanyak 60 data. Penjelasan dari hasil analisis statistik deskriptif untuk masing-masing variabel, antara lain:

Penerimaan PPN dihasilkan rata-rata 0,0636, dengan nilai terendah (minimum) sebesar -0,48 dan nilai tertinggi (maksimal) sebesar 1,38, sedangkan standar deviasi adalah 0,37602. Maka dapat disimpulkan sebaran data yang dilakukan oleh KPP Pratama Semarang Barat menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam penerimaan PPN antar bulan maupun antar tahun selama periode penelitian.

Insentif pajak dihasilkan rata-rata 15,90, dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 65, sedangkan standar deviasi adalah 12,204. Maka dapat disimpulkan sebaran data insentif pajak dikategorikan tidak stabil, karena menunjukkan variasi yang tinggi.

Pemeriksaan pajak dihasilkan rata-rata 2,95, dengan nilai terendah (minimum) sebesar 0 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 26, sedangkan standar deviasi adalah 6,596. Maka dapat disimpulkan sebaran data pemeriksaan pajak juga dikategorikan tidak stabil.

Kepatuhan pajak dihasilkan rata-rata 8,7802, dengan nilai terendah (minimum) sebesar 7,97 dan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 9,53, sedangkan standar deviasi adalah 0,64105. Maka dapat disimpulkan sebaran data pemeriksaan pajak dapat dikategorikan stabil, karena variasinya rendah dan konsisten.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah data residual dalam model regresi terdistribusi normal. Pengujian ini menggunakan uji statistik Non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan apabila probabilitas signifikansi $> 0,05$, maka disimpulkan datanya terdistribusi normal. Hasil uji K-S tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		Unstandardized Residual
		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,37505
Most Extreme Differences	Absolute	0,079
	Positive	0,079
	Negative	-0,067
Test Statistic		0,079
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 ^{c,d}

Sumber: Output SPSS 26, data diolah tahun 2025

Berdasarkan output SPSS pada Tabel 4.2, uji K-S menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200 yang berarti lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa data terdistribusi normal sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat hubungan antar variabel independen. Seharusnya, dalam model regresi yang baik tidak terdapat hubungan korelasi antarvariabel independen (Ghozali, 2021). Berikut ini merupakan hasil uji yang telah dilakukan:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Insentif Pajak	0,821	1,218
	Pemeriksaan Pajak	0,918	1,089
	Kepatuhan Pajak	0,761	1,314

Sumber: Output SPSS 26, data diolah tahun 2025

Temuan dari uji multikolinearitas menunjukkan hasil bahwa setiap variabel independen mempunyai nilai toleransi lebih dari 0,10 serta nilai VIF berada kurang dari 10. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat hubungan antara kesalahan residual pada periode waktu sekarang (t) dengan kesalahan residual pada periode sebelumnya (t-1). Problem autokorelasi terjadi ketika ada korelasi (Ghozali, 2021). Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan metode Durbin-Watson dengan hasil yang dipaparkan berikut ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,072	0,005	-0,048	0,38496	2,195

Sumber: Output SPSS 26, data diolah tahun 2025

Hasil uji DW di Tabel 4.4, diperoleh nilai DW adalah 2,195. Dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (N) adalah 60, dan tiga variabel bebas (K=3), sehingga didapat nilai batas bawah (dl) ialah 1,388 dan nilai batas atas (du) ialah 1,654. Karena nilai DW adalah 2,195 lebih tinggi dari batas atas (du) 1,654 dan lebih rendah dari $4 - 1,654$ ($4 - du$), maka $du < DW < 4 - du$ adalah $1,654 < 2,195 < 2,346$. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami autokorelasi, baik positif maupun negatif.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menilai apakah dalam model regresi mengandung varians residual yang tidak konstan atau bersifat heterogen. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Glejser, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	1,824	0,073
	Insentif Pajak	0,186	0,853
	Pemeriksaan Pajak	-1,417	0,162
	Kepatuhan Pajak	-1,272	0,209
a. Dependent Variable: ABS_RES			

Sumber: Output SPSS 26, data diolah tahun 2025

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan nilai signifikansi pada variabel insentif pajak adalah 0,853, pemeriksaan pajak nilai signifikasinya adalah 0,162, serta kepatuhan pajak adalah 0,209. Sehingga disimpulkan nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut $> 0,05$, berarti tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan dan pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,051	0,815		-0,063	0,950
	Insentif Pajak	0,000	0,005	-0,008	-0,055	0,957
	Pemeriksaan Pajak	-0,004	0,008	-0,073	-0,526	0,601
	Kepatuhan Pajak	0,015	0,090	0,025	0,167	0,868
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN						

Sumber: Output SPSS 26, data diolah tahun 2025

Model regresi yang digunakan berdasarkan Tabel 4.6 adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -0,051 + 0,000X_1 - 0,004X_2 + 0,015X_3$$

Berdasarkan pada Tabel 4.6 persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta dihasilkan nilai negatif ini menunjukkan bahwa apabila variabel insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak bernilai nol, maka penerimaan PPN akan bernilai -0,051. Nilai negatif pada konstanta tidak

menjadi masalah, melainkan hanya menunjukkan kondisi dasar model regresi ketika variabel independen tidak berpengaruh.

2. Koefisien insentif pajak dihasilkan nilai sebesar 0 yang artinya insentif pajak memiliki pengaruh positif tetapi sangat lemah terhadap penerimaan PPN. Setiap kenaikan insentif pajak sebesar satu unit secara teoritis akan meningkatkan penerimaan PPN, meskipun pengaruhnya hampir tidak signifikan karena nilainya sangat kecil.
3. Koefisien pemeriksaan pajak dihasilkan nilai sebesar -0,004 yang artinya pemeriksaan pajak juga memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN. Artinya, semakin banyak atau intens pemeriksaan pajak yang dilakukan, justru menurunkan penerimaan PPN sebesar 0,004, dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Koefisien kepatuhan pajak dihasilkan nilai sebesar 0,015 yang artinya kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Setiap kenaikan satu satuan kepatuhan pajak akan meningkatkan penerimaan PPN sebesar 0,015, dengan asumsi variabel lain tetap.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2021). Koefisien determinasi yang bernilai rendah mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas (insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak) memiliki keterbatasan dalam

memberikan penjelasan yang memadai terhadap variabel dependen, yaitu penerimaan PPN. Berikut hasil pengujian ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,072 ^a	0,005	-0,048	0,38496
a. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pajak, Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak				

Sumber: Output SPSS 26, data diolah tahun 2025

Hasil pengujian pada Tabel 4.7, didapatkan nilai R Square adalah 0,005, artinya sebesar 0,5% variasi penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh variabel insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak. Artinya, kontribusi ketiga variabel independen dalam model regresi terhadap perubahan penerimaan PPN sangat kecil. Sementara nilai Adjusted R Square sebesar -0,048 mengindikasikan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan sampel, kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen justru menjadi negatif. Menurut Ghazali (2021), nilai Adjusted R Square dapat bernilai negatif apabila variabel-variabel independen yang digunakan tidak mampu menjelaskan variasi variabel dependen secara baik, atau karena jumlah data yang digunakan relatif kecil.

4.2.4.2 Uji F

Pengujian ini dimaksudkan untuk menilai apakah seluruh variabel bebas berpengaruh signifikan pada variabel terikat secara bersamaan. Dasar keputusannya sesuai dengan uji f, apabila nilai probabilitas (sig.) $> 0,05$, disimpulkan bahwa

variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas $< 0,05$, yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian ini:

Tabel 4.8

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,043	3	0,014	0.097	0,961
	Residual	8,299	56	0,148		
	Total	8,342	59			
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN						
b. Predictors: (Constant), Kepatuhan Pajak, Insentif Pajak, Pemeriksaan Pajak						

Sumber: Output SPSS 26, data diolah tahun 2025

Hasil output SPSS pada Tabel 4.8, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,961. Nilai ini lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yang terdiri dari insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4.2.4.3 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial, yaitu apakah suatu variabel bebas berpengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat secara statistik. Berdasarkan Ghazali (2021), kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka variabel bebas dinyatakan pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka pengaruh tersebut dianggap tidak signifikan. Hasil pengujian yang telah dilakukan disajikan berikut ini:

Tabel 4.9

Hasil Uji t

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,051	0,815		-0,063	0,950
	Insentif Pajak	0,000	0,005	-0,008	-0,055	0,957
	Pemeriksaan Pajak	-0,004	0,008	-0,073	-0,526	0,601
	Kepatuhan Pajak	0,015	0,090	0,025	0,167	0,868
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN						

Sumber: Output SPSS 26, data diolah tahun 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada Tabel 4.9, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Insentif pajak : hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,950 > 0,05$ dengan koefisien B sebesar $0,000$. Hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.
2. Pemeriksaan pajak : hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,601 > 0,05$ dengan koefisien B sebesar $-0,004$. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.
3. Kepatuhan pajak : dari hasil pengujian didapatkan nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar $0,868 > 0,05$ dengan koefisien B sebesar $0,015$. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan PPN.

4.3 Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait hasil pengujian statistik yang diperoleh. Pada penelitian ini, interpretasi dilakukan untuk mempelajari hubungan antara variabel insentif pajak, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan pajak terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat. Bagian ini berisi hasil analisis yang berkaitan dengan dasar teori serta hasil penelitian terdahulu.

4.3.1 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel insentif pajak memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penerimaan PPN di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini terlihat dari hasil uji t dengan signifikansi sebesar 0,957 dan koefisien regresi sebesar 0,000. Secara teoritis, asumsi tersebut berasal dari pemahaman bahwa pembebasan atau pengurangan kewajiban pajak yang diberikan melalui insentif pajak dapat menyebabkan penurunan penerimaan negara dalam jangka pendek (Bagus et al., 2022). Namun, data empiris dalam penelitian ini menunjukkan sebaliknya, yaitu insentif pajak mampu mendorong peningkatan penerimaan PPN. Maka dari itu, hipotesis pertama yang menyatakan insentif pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan PPN dinyatakan tidak terbukti atau tidak dapat diterima.

Kebijakan insentif pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi terutama dalam sektor-sektor strategis seperti UMKM, industri manufaktur, dan sektor ekspor. Ketika bisnis mendapatkan pembebasan atau pengurangan beban pajak, pelaku usaha memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan volume transaksi, dan memperluas jangkauan pasar. Peningkatan aktivitas ekonomi akan menghasilkan peningkatan basis pajak, termasuk PPN yang dikenakan atas transaksi barang dan jasa (Lestari et al., 2021). Dalam praktiknya, insentif PPN banyak diberikan di sektor perumahan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mendorong investasi dan konsumsi, yang secara tidak langsung akan meningkatkan transaksi kena pajak secara tidak langsung.

Menurut *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menyatakan bahwa perilaku, norma, serta persepsi kontrol memengaruhi perilaku individu termasuk kepatuhan dalam membayar pajak. Pemberian insentif pajak yang efektif tidak hanya akan mengurangi beban fiskal, tetapi juga akan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Kondisi ini terjadi ketika wajib pajak merasakan adanya kemudahan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, seperti menyetorkan dan melaporkan PPN. Persepsi positif terkait keringanan pajak ditambah dorongan norma sosial dan dukungan kebijakan fiskal akan memperkuat niat wajib pajak untuk patuh.

4.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi 0,601 dan koefisien regresi sebesar -0,004. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh positif dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN dinyatakan tidak dapat diterima. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan pada periode penelitian tidak cukup memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan PPN. Pemeriksaan pajak berfungsi sebagai salah satu instrumen pengawasan Direktorat Jenderal Pajak yang berperan penting untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta mencegah adanya praktik penghindaran pajak atau pelaporan fiktif (Mais & Nuryati, 2024).

Pemeriksaan pajak tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sarana pembinaan dan edukasi kepada wajib pajak. Melalui pelaksanaan pemeriksaan, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan melaporkan dan pembayaran pajak karena adanya potensi sanksi apabila ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Chandra et al. (2023) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Bagus et al. (2022) yang menunjukkan pengaruh negatif pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPN yang kemungkinan disebabkan oleh wajib pajak yang menentang pemeriksaan atau rendahnya efektivitas pemeriksaan pada saat itu.

Berdasarkan teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) yang membedakan antara faktor internal dan eksternal yang dipengaruhi oleh perilaku seseorang dapat menjelaskan penelitian ini secara teoritis. Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak termasuk ke dalam faktor eksternal yang memaksa wajib pajak untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan hukum. Pengaruh dari luar yang menimbulkan tekanan psikologis dan hukum dapat menyebabkan wajib pajak berperilaku lebih patuh karena mengetahui adanya kemungkinan diperiksa. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilaksanakan secara profesional dan insentif berpotensi meningkatkan penerimaan PPN.

4.3.3 Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan PPN dengan nilai signifikansi 0,868 serta koefisien regresi 0,015. Temuan ini mendukung hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Kepatuhan oleh wajib pajak diukur dari presentasi wajib pajak yang melaporkan serta membayar kewajiban PPN secara tepat waktu (Dewi & Pravitasari, 2022). Hal ini merupakan salah satu indikator utama efektivitas sistem perpajakan di Indonesia.

Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang secara sadar dan sukarela memenuhi kewajibannya, maka semakin besar basis penerimaan negara dari sektor perpajakan, khususnya PPN. Hal ini menunjukkan bahwa program edukasi dan penyuluhan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kewajiban perpajakan. Hasil ini sejalan dengan studi Bagus et al. (2022) yang menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN.

Mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), kepatuhan pajak adalah perilaku yang didasari niat individu yang terbentuk melalui pengaruh sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol. Dalam konteks ini, meskipun wajib pajak melaporkan kewajibannya, kontribusi terhadap penerimaan PPN belum maksimal, kemungkinan karena adanya faktor eksternal lain seperti perlambatan ekonomi.

Perilaku patuh akan terbentuk secara konsisten ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang kuat mengenai manfaat membayar pajak, memiliki lingkungan sosial yang mendukung, dan merasa mampu secara administratif dan finansial untuk mematuhi aturan. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan sistem fiskal dalam membangun budaya pajak yang kuat dan berkelanjutan.